



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020



**PANGKALPINANG
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu dari Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mendukung dan melaksanakan RPMJD 2017-2022, mendukung sepenuhnya Rencana Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan pedoman dan acuan bagi Sekretariat Dewan dan seluruh aparatur Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan pelayanan bagi pelaksanaan tugas, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SEKRETARIS DPRD



SYAIFUDDIN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630312 198503 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA	8
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun	8
Lalu dan Capaian Renstra PD	
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat	21
Daerah	
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas	25
dan Fungsi Perangkat Daerah	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	32
Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT	33
DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat	34
Daerah	
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	42
PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan	42
BAB V PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja-PD merupakan penjabaran dari dokumen Renstra-PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).
2. Renja-PD sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah.
3. Pelaksanaan Renja-PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam laporan kinerja yaitu Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana PD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja PD harus sesuai dengan program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan Renstra Tahun 2017-2022.
4. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
5. Program dan kegiatan dalam Renja PD dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran, hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan indikatif yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6).
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E.);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja PD ini adalah sebagai salah satu fasilitasi dan panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas dan akutabel, yaitu :

1. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah tahun 2017-2022 dengan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rancangan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

2.1. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD

3.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

4.1. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD. Dikaitkan dengan pencapaian Renstra PD.

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kajian (review) terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun IKK sesuai Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tupoksi perangkat daerah, dampak terhadap pencapaian visi, misi KDH, terhadap pencapaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, serta formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Memuat review perbandingan Program dan Kegiatan pada Ranwal RKPD dengan Program dan Kegiatan hasil evaluasi tahun lalu dan tahun berjalan

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Memuat penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan diperoleh serta penjelasan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Memuat tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tupoksi perangkat daerah

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah yang dikaitkan dengan target kinerja sasaran rencana kerja perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan program dan kegiatan yang memuat tentang faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, atau kombinasi kedua-duanya.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD

Adapun pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2018 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka tertuang dalam Program Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pada Indikator Program untuk Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD yang ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2018 sebesar 90%. Setelah pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran 2018 realisasi capaiannya sebesar 99,76 % dengan rasio capaian 110,66%. Ini dapat tercapai dikarenakan beberapa kegiatan yang ada di bawah indikator program ini dapat terealisasi pelaksanaannya hampir 100% kecuali untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dikarenakan adanya mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pada Indikator Program untuk Nilai LAKIP Sekretariat DPRD yang ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2018 sebesar 76, dapat tercapai dengan nilai 74,01, dengan rasio capaian sebesar 97,38%.
3. Pada Indikator Program untuk Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2018 sebesar 95% dengan bentuk kegiatan untuk mempublikasikan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik melalui media surat kabar, media televisi, media radio, media online maupun melalui baliho-baliho serta spanduk. Dan ternyata realisasi capaian pada tahun 2018 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 216,7% dengan rasio capaian sebesar 228,07%. Hal ini dapat terealisasi karena adanya kerjasama

yang baik dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menginformasikan berbagai kegiatan dan tugas mereka serta kesigapan Sekretariat untuk selalu proaktif dalam mempublikasikannya.

4. Pada Indikator Program untuk Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD yang ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2018 sebesar 75%, dalam proses pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung DPRD dapat direalisasikan capaiannya melebihi target yang ada yaitu 99,3% dengan rasio capaian 132,4%. Dan dalam prosesnya juga berbasis responsif gender dengan memperhatikan peruntukan bagi kaum perempuan, manula dan disabilitas.
5. Pada Indikator Program untuk Persentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD yang ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2018 sebesar 80% ternyata dapat direalisasikan capaiannya hingga 93,75 dengan rasio capaian hingga 117,19%. Hal ini terjadi karena tingginya intensitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dan disamping itu juga dipengaruhi oleh isu-isu politik yang berkembang pada tahun 2018.

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan
Pencapaian RENSTRA Sekretariat DPRD s.d Tahun 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program & Kegiatan renja PD tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan S.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Urusan : Pilihan									
	Bidang Urusan :									
	Target Capaian Program Renstra PD tahun 2012-2017									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan administrasi perkantoran		103,15				0		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		110,34				-	-	-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa listrik dan air, komunikasi		90,12				-	-	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		98,41				-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan		84,91				-	-	-

				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		105,18				-	-	-
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya peralatan kerja yang baik		88,99				-	-	-
				Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor		98,34				-	-	-
				Penyediaan cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		91,55				-	-	-
				Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		94,43				-	-	-
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		103,61				-	-	-
				Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		82,64				-	-	-
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Bahan makanan dan minuman		94,21				-	-	-
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		94,73				-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Gaji PHL data Base		99,61				-	-	-
				Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terpeliharanya Kesehatan Pimpinan Dan Anggota DPRD		346,78				-	-	-

				Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	Terselenggaranya Koordinasi, Konsolidasi pelaksanaan kinerja ke Dalam Daerah		66,49				-	-	-
				Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Rumdinjab	Tersedianya operasional Rumah tangga Rumdinjab		3,12				-	-	-
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		83,14						
				DED Pembangunan Gedung Utama DPRD	Terlaksananya DED Pembangunan Gedung Kantor DPRD		96,50				-	-	-
				Pembuatan Gedung kantor	Terlaksananya pembuatan gedung kantor Sekretariat DPRD		-				-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya mobil dinas operasional Sekretariat DPRD		98,89				-	-	-
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan		97,04				-	-	-
				Pengadaan gudang arsip dan garasi	Tersedianya gudang penyimpanan arsip dan garasi		94,05				-	-	-
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		107,42			#DIV/0!	-	-	-
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan		100,08				-	-	-
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Gedung kantor		108,78				-	-	-
				Pengadaan Genset	Meningkatnya kualitas layanan		-				-	-	-

				Peningkatan Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD	Meningkatnya kualitas rumah dinas jabatan yang representatif		69,47				-	-	-
				Peningkatan gedung kantor	Meningkatnya kualitas gedung kantor yang representatif		97,77				-	-	-
				Pengadaan E-Risalah	Tersedianya e-risalah Sekretariat DPRD		89,04				-	-	-
				Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Telaksananya Rehabilitas Gedung Kantor Sekretariat DPRD dan Kantor DPRD		104,99				-	-	-
				Revitalisasi Saluran Air dan Drainase Pagar Depan DPRD	Tersedianya Rumah Dinas Jabatan yang Representatif		100				-	-	-
				Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		97,79						
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		97,79				-	-	-
				Fasilitasi dan Advokasi Responsif Gender	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Responsif Gender		-				-	-	-
				Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan kualitas aparatur		111,05						
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang – Undangan		111,05				-	-	-
				Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		53,69						

				Fit and Proper Test tentang Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) dan komisi Informasi daerah	Terselenggaranya Fit & Proper Test tentang pemilihan anggota KPID dan KID		54				-	-	-
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		79,21						
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Rancangan Perda		103,93				-	-	-
				Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah/ Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	Terhimpunnya data masukan melalui heraing/ dialog		-				-	-	-
				Rapat - Rapat Paripurna	Terpenuhinya administrasi rapat-rapat paripurna		89,62				-	-	-
				Kegiatan Reses	Terpenuhinya informasi kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan Pemerintah di dapil anggota DPRD masing-masing		55,64				-	-	-
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD di dalam daerah		82,41				-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Terlaksananya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		85,70				-	-	-
				Studi Banding	Terlaksananya tugas dan wewenang DPRD dalam studi banding ke daerah lain		89,54				-	-	-

				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Terlaksananya tugas dan wewenang DPRD dalam kunjungan kerja						-	-	-
				Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Se Indonesia	Terlaksananya Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD dalam rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD se Indonesia		54,97				-	-	-
				Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	Meningkatkan Wawasan, Kompetensi dan Kinerja Anggota DPRD		75,04				-	-	-
				Koordinasi dan Konsultasi Masalah Hukum Dan Administrasi Kesekretariatan	Terselenggaranya fasilitasi dan Konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan		25,70				-	-	-
				Sebelumnya Parlementaria berubah menjadi Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersedianya sarana hubungan Kelembagaan DPRD dan Masyarakat		120,56				-	-	-
				Sosialisasi Peraturan Daerah	Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat						-	-	-
				Kunjungan Kerja Komisi	Terlaksananya Kunjungan kerja komisi		94				-	-	-
				Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Badan Musyawarah		97				-	-	-
				Kunjungan Kerja Badan Anggaran	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Badan Anggaran		98				-	-	-
				Kunjungan Kerja Badan Legislasi	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Badan Legislasi		91				-	-	-

				Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Badan Kehormatan		100				-	-	-
				Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD	tersedianya media bagi keparlemenan dan penyebaran informasi		83				-	-	-
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD		52,57						
				Pembahasan RKA-SKPD Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel)	Terlaksananya Penetapan Perda APBDP 2017, dan APBD 2018		86,47				-	-	-
				Penilaian Harga Tunjangan Perumahan & Transportasi Anggota DPRD Prov. Kep. Babel Sisa Masa bakti 2017-2019	Tersusunnya Pergub tentang kewajaran harga tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD		18,67				-	-	-
				Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	Terfasilitasinya dokumentasi hasil rapat, persidangan dan peraturan perundang –undangan		71,29						
				Fasilitasi dan Dokumentasi Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya sarana dokumentasi persidangan dan peraturan perundang – Undangan		71,29				-	-	-

					Target Capaian Program Renstra PD tahun 2017-2022										
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	90					99,59	90		
					Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Anggota DPRD dan pegawai (ASN dan THL) Sekretariat DPRD yang terlayani (Orang)	1.325	0	245	242	98,78	255	497	37,51	
					Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Seragam Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Sekretariat DPRD (Stel)	2.813	0	544	544	100,00	562	1.106	39,32	
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD yang meningkat kapasitasnya (orang)	400	0	74	74	100,00	77	151	37,75	
						Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	76	-		-					
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	15	0	3	3	100	3	6	40,00	
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (laporan)	35	0	7	7	100	7	14	40,00	

				Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Kehumasan dan Protokol Dewan	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokol dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	95	-	-	149,69	95			
				Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah publikasi kegiatan anggota DPRD	150	0	30	65	216,67	30	95	63,33
				Forum Komunikasi Sekwan se-Indonesia	Jumlah rekomendasi/ kesepakatan Sekretaris DPRD se Indonesia dalam FORKOM	3	0	1	1	100,00	-	1	33,33
					Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD	75	0		0		76		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	Jumlah peningkatan sarana prasarana Sekretariat DPRD	80	0	75	99,3	132,40	76	58	73,04
				Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Persentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD	80				92,26	80		
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya	Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas	111	0	15	15	100,00	20	35	31,53
				Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	75	0	15	15	100,00	15	30	40,00
				Kegiatan Reses	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari aspirasi masyarakat	15	0	3	2	66,67	3	5	33,33
				Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat	450	0	90	45	50,00	90	135	30,00

				Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se-Indonesia	Jumlah rekomendasi / kesepakatan	15	0	3	4	133,33	3	7	46,67
				Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	Jumlah tenaga ahli dan pakar hukum	50	0	8	9	112,50	9	18	36,00
				Koordinasi dan Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan	Jumlah dokumen/laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi	25	0	5	0	0,00	5	5	20,00
				Kunjungan Kerja Komisi	Jumlah Dokumen/ laporan Kegiatan Komisi	1.920	0	192	280	145,83	288	568	29,58
				Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan Banmus	30	0	6	4	66,67	6	10	33,33
				Kunjungan Kerja Badan Anggaran	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan Banggar	30	0	6	6	100,00	6	12	40,00
				Kunjungan Kerja Badan Legislasi/BAPEMPERDA	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan Bapemperda	30	0	6	6	100,00	6	12	40,00
				Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan BK	30	0	6	7	116,67	6	13	43,33
				Pembahasan Anggaran Pemprov. Kep. Bangka Belitung	JumlahDokumen nota/kesepakatan	20	0	4	4	100,00	4	8	40,00
				Fit and Proper Test tentang Pemilihan Anggota Komisi Lembaga Negara Lainnya	Terpilihnya anggota Komisi Lembaga Negara Lainnya	1	0	1	1	100,00	-	1	100,00

Pada dasarnya pelaksanaan program/kegiatan APBD TA.2018 dapat berjalan dengan baik, meskipun tidak sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan. Kami akan berupaya untuk menyelesaikan hambatan yang kami hadapi sehingga seluruh program/kegiatan RENJA tahun 2018 dapat diselesaikan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi sehingga tidak sesuai target baik secara keuangan maupun pelaksanaannya adalah:

1. Terdapat beberapa kegiatan di Sekretariat DPRD yang hingga akhir bulan Desember 2018 serapan anggaran dan realisasi fisiknya belum sesuai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan padatnya jadwal kegiatan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
2. Belum maksimalnya dan terimplementasikannya Standart Operasional Procedure (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal dikarenakan tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
3. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, disebabkan adanya perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan belum dapat bekerja secara maksimal.

Dengan ditemukannya kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja selama Tahun 2018 baik internal maupun eksternal, Sekretariat DPRD terus bertekad mengevaluasi dan memperbaiki sehingga kendala-kendala tersebut dapat dikurangi dimasa yang akan datang. Dari kendala yang dikemukakan seperti di atas secara umumnya, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk melakukan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Mendorong pejabat eselon terkait dan para PPTK di Sekretariat DPRD untuk mengintensifkan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan sehingga realisasi keuangan serta realisasi fisik kegiatan pada

Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan bersama.

2. Meningkatkan konsolidasi internal terhadap Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan pencapaian target program pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan dan memaksimalkan Standart Operasional Procedure (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal dalam rangka mengantisipasi tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
4. Memberdayakan, mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya para pengelola keuangan dan perencanaan daerah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capain kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diukur melalui Pengukuran Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja yang telah sepakati, pengukuran kinerja ini digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran melalui indikator kinerja dan pencapaian target Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan maupun pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan progam/kegiatan di masa yang akan datang. Kesimpulan hasil evaluasi memberikan gambaran mengenai capaian nilai

kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan menggunakan angka persentase skala pengukuran ordinal.

Analisis capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 berdasarkan sasaran strategi yang ada pada Dokumen Indikator Kinerja Utama yang telah diukur, dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator	SMP/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan / Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran</i>	-	-	100	-	-	-	92,29	-	-	-	RENSTRA 2012-2017
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	100	-	-	-	99,57	-	-	-	RENSTRA 2012-2017
	Meningkatnya Disiplin Aparatur	-	-	100	-	-	-	97,79	-	-	-	RENSTRA 2012-2017
	Meningkatnya pengetahuan dan kualitas aparatur	-	-	100	-	-	-	86,68	-	-	-	RENSTRA 2012-2017
	Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	-	-	100	-	-	-	53,69	-	-	-	RENSTRA 2012-2017
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	100	-	-	-	73,54	-	-	-	RENSTRA 2012-2017
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD	-	-	100	-	-	-	52,57	-	-	-	RENSTRA 2012-2017
	Terfasilitasinya dokumentasi hasil rapat, persidangan dan peraturan perundang -undangan	-	-	100	-	-	-	71,29	-	-	-	RENSTRA 2012-2017
	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	-	90%	90%	90%	-	99,76	99,80%	99,80%	RENSTRA 2017-2022

Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah ()	-	-	-	76%	77%	78%	-	-----	77	78	RENSTRA 2017-2022
Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoleran bagi anggota DPRD	-	-	-	95%	95%	95%	-	216,67	100,00%	100,00%	RENSTRA 2017-2022
Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan	-	-	-	75%	76%	77%	-	99,3	99,40%	99,40%	RENSTRA 2017-2022
Persentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD	-	-	-	80%	80%	80%	-	93,75	94,00%	94,00%	RENSTRA 2017-2022

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan baik program/kegiatan yang prioritas maupun yang bersifat penunjang adalah sebagai berikut :

1. Belum terintegrasinya antara Perencanaan kinerja dan penganggaran (RKA, DPA, RKPA, DPPA) secara konsisten dan sistematis sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
2. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan, disebabkan adanya perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat bekerja secara maksimal;
3. Belum maksimalnya dan terimplementasikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal dikarenakan tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia oleh aparatur di Sekretariat DPRD mengingat Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;
5. Belum terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan bidang dan Tupoksinya.

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengintegrasian antara Perencanaan dan anggaran kinerja dilakukan secara sinergis dan lebih cermat, sedangkan untuk revisi anggaran

dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;

2. Mengoptimalkan dan memaksimalkan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memberikan berbagai pelatihan berkenaan dengan sistem pelaporan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal dalam rangka mengantisipasi tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
4. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan dan pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia;
5. Peningkatan / pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM dilakukan lebih intensif melalui pendidikan dan pelatihan (Bimtek).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (riil) dalam Renja SKPD. Berkaitan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sesuai sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.4
Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	90%	13.658.823.190	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	90%	8.715.032.000	
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prov. Kep. Babel	Jumlah Anggota DPRD dan pegawai (ASN dan THL) Sekretariat DPRD yang terlayani (Orang)	265 Orang	11.821.577.790	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prov. Kep. Babel	Jumlah Anggota DPRD dan pegawai (ASN dan THL) Perangkat daerah yang terlayani (Orang)	265 orang	7.490.000.000	Perubahan indikator kinerja
2	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prov. Kep. Babel	Jumlah Seragam Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Sekretariat DPRD (Stel)	562 stel	967.685.400	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prov. Kep. Babel	Jumlah Seragam Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Perangkat daerah (Stel)	562 stel	533.682.000	Perubahan indikator kinerja
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD yang meningkat kapasitasnya (orang)	80 orang	769.560.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prov. Kep. Babel	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	80 orang	350.000.000	Perubahan indikator kinerja
			Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	77%				Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	77%		

4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	3 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	3 Dokumen	163.750.000	
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (laporan)	7 dokumen	50.000.000	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (laporan)	7 laporan	177.600.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Kehumasan dan Protokol Dewan		Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoleran bagi anggota DPRD	95%	7.959.392.100	Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Kehumasan dan Protokol Dewan		Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoleran dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	95%	9.504.587.500	
6	Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prov. Kep. Babel	Jumlah publikasi fungsi kelembagaan	30 Publikasi	2.976.224.900	Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prov. Kep. Babel	Jumlah publikasi fungsi kelembagaan	200 Publikasi	2.000.000.000	Perubahan target
7	Forum Komunikasi Sekwan se-Indonesia	Prov. Kep. Babel	Jumlah rekomendasi/ kesepakatan Sekretaris DPRD se Indonesia dalam FORKOM	0 dokumen/ laporan	0	Forum Komunikasi Sekwan se-Indonesia	Prov. Kep. Babel	Jumlah rekomendasi/ kesepakatan Sekretaris DPRD se Indonesia dalam FORKOM	0 dokumen/ laporan	0	

			Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan	77%				Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD	77%		
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPRD dan Sekretariat	Prov. Kep. Babel	Jumlah peningkatan sarana prasarana Sekretariat DPRD	77%	4.983.167.200	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPRD dan Sekretariat	Prov. Kep. Babel	Presentase pelaksanaan pekerjaan peningkatan sarana prasarana perkantoran	77%	3.989.562.500	
9	Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD	Prov. Kep. Babel	-	-	-	-		Persentase anggota DPRD & ASN yang mendapatkan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan 100 persen	100%	3.515.025.000	Kegiatan Baru
	Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan		Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	80%	79.070.014.837	Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan		Presentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD	80%	62.741.237.923	
10	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas	23 Raperda/produk hukum lainnya	23.380.709.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya	Prov. Kep. Babel	Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas	23 Raperda/pr oduk hukum lainnya	12.902.550.000	
11	Rapat-Rapat Paripurna	Prov. Kep. Babel	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	3 paripurna istimewa, 12 paripurna biasa	701.496.290	Rapat-Rapat Paripurna	Prov. Kep. Babel	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	15 paripurna istimewa/ biasa	346.900.000	

12	Reses	Prov. Kep. Babel	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari aspirasi masyarakat	3 dokumen/laporan	8.983.161.000	Reses	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	3 dokumen/laporan	7.135.287.923	Perubahan indikator kinerja
13	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat	90 orang	1.818.690.500	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Prov. Kep. Babel	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat	90 orang	1.500.000.000	
14	Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se-Indonesia	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah rekomendasi / kesepakatan	3 kesepakatan	644.022.500	Rapat Koordinasi Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)	Prov. Kep. Babel	Jumlah rekomendasi / kesepakatan	3 kesepakatan	250.000.000	
15	Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	Prov. Kep. Babel	Jumlah tenaga ahli dan pakar hukum	10 tenaga ahli dan pakar hukum	882.561.900	Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	Prov. Kep. Babel	Jumlah tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli	7 tenaga ahli dan 5 kelompok pakar/tim ahli	1.018.100.000	
16	Koordinasi dan Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen/laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi	5 laporan	242.000.000	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum DPRD	Prov. Kep. Babel	-	-	-	Perubahan nama kegiatan
	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum DPRD		-	-	-	-	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen/laporan	5 dokumen/laporan	150.000.000	Perubahan nama kegiatan
17	Kunjungan Kerja Komisi	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen/laporan Kegiatan Komisi	384 laporan	33.877.797.800	Kunjungan Kerja Komisi	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Komisi	384 laporan	35.391.538.500	Perubahan indikator kinerja
18	Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen/laporan kegiatan Banmus	6 dokumen /laporan	1.598.676.200	Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Musyawarah	6 laporan	1.090.062.500	Perubahan indikator kinerja
19	Kunjungan Kerja Badan Anggaran	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen/laporan kegiatan Banggar	6 dokumen /laporan	3.014.533.500	Kunjungan Kerja Badan Anggaran	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Anggaran	6 laporan	1.700.000.000	Perubahan indikator kinerja

20	Kunjungan Kerja Badan Legislasi/BAPEM PERDA	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan Bapemperda	6 dokumen /laporan	2.331.707.147	Kunjungan Kerja Badan Legislasi/Pembentukan Perda	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah	6 laporan	800.000.000	Perubahan indikator kinerja
21	Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan BK	6 dokumen /laporan	1.137.279.000	Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Kehormatan	6 laporan	299.999.000	Perubahan indikator kinerja
22	Pembahasan Anggaran Pemprov. Kep. Bangka Belitung	Prov. Kep. Babel	JumlahDokumen nota/kesepakatan	4 dokumen/ laporan	457.380.000	Pembahasan Anggaran Pemerintah prov. Kep. Babel	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen /nota kesepakatan	4 dokumen/ laporan	156.080.000	
23	Fit and Proper Test tentang Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Prov. Kep. Babel	Terpilihnya anggota Komisi Lembaga Negara Lainnya	0 orang	0	Fit and Proper Test tentang Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Prov. Kep. Babel	Terpilihnya anggota Komisi Lembaga Negara Lainnya	0 orang	0	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan langsung terhadap anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi tersebut maka tidak dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait dengan visi, misi presiden telah tertuang dalam Kebijakan Pemerintah Provinsi yaitu di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 mengenai strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing masing misi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, meliputi :

VISI :	Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi		
MISI V :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatkan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Tata Kelola Penataan Peraturan Perundang - Undangan

Dengan demikian ada keterkaitan dan sinergitas yang jelas antara visi -misi dan agenda Gubernur terpilih serta tujuan, strategi, kebijakan dan program dalam RPJMD dengan Review Renja Sekretariat DPRD. Kajian/telaahan terhadap kebijakan di tingkat Provinsi menguraikan arah kebijakan pembangunan provinsi yang tertuang dalam RPJMD terutama keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan peran DPRD sesuai

dengan fungsinya. Hal tersebut memperjelas keterkaitan antara Penyelenggaraan fungsi DPRD dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu di lakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategi daerah yang harus diselesaikan oleh suatu perangkat daerah pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas kecapaian sasaran yang ingin diraih dari masing- masing misi.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam review rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu Tahun 2020 ditetapkan sasaran-sasaran beserta indikator kinerja utama seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Program	Tahun / Rencana Target Kinerja 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)
1	Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Internal oleh Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal oleh Sekretariat DPRD	1. Nilai kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD	90%
				2. Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	78
				3. Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	95%
				4. Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD	77%
2	Peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Meningkatnya produk hukum yang dihasilkan lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan Lainnya	Persentase Produk hukum yang dihasilkan lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	5. Persentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD	80%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan merupakan acuan atas rencana aksi untuk melaksanakan atau mengoperasionalkan berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Program adalah suatu kumpulan kegiatan yang diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu rencana.

Kegiatan adalah penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian Visi dan Misi perangkat daerah.

Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program - program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH

Dengan Kegiatan :

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

Dengan Kegiatan :

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- Rapat-Rapat Paripurna
- Reses
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD
- Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se-Indonesia.
- Penyediaan Tenaga Ahli & Kegiatan Akademik
- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum DPRD.
- Kunjungan Kerja Komisi.
- Kunjungan Kerja Badan Musyawarah.

- Kunjungan Kerja Badan Anggaran.
- Badan Legislasi/Badan Pembentukan Peraturan Daerah
- Badan Kehormatan.
- Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel.

3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN

Dengan Kegiatan :

- Publikasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPRD & Sekretariat
- Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD

TABEL 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		90%	8.715.032.000	APBD		90%	15.014.705.509
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Anggota DPRD dan pegawai (ASN dan THL) Perangkat daerah yang terlayani (Orang)	Prov. Kep. Babel	265 orang	7.490.000.000	APBD	275 orang	13.003.735.569
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Seragam Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Perangkat daerah (Stel)	Prov. Kep. Babel	562 stel	533.682.000	APBD	570 stel	1.064.453.940
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	Luar Prov. Kep. Babel	80 orang	350.000.000	APBD	83 orang	846.516.000
		Nilai LAKIP Sekretariat DPRD		78%				79%	

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	Prov. Kep. Babel	3 Dokumen	163.750.000.	APBD		3 Dokumen	200.000.000
				Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (laporan)	Prov. Kep. Babel	7 dokumen	177.600.000	APBD		7 dokumen	200.000.000
				Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Kehumasan dan Protokoler Dewan	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintahan daerah		95%	9.504.587.500	APBD		95%	12.005.331.310
				Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah publikasi fungsi kelembagaan	Prov. Kep. Babel	200 Publikasi	2.000.000.000	APBD		210 Publikasi	3.273.847.390
					Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan		77%				78%	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPRD dan Sekretariat	Jumlah peningkatan sarana prasarana Sekretariat DPRD	Prov. Kep. Babel	77%	3.989.562.500	APBD		78%	5.481.483.920

				Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD	Persentase anggota DPRD & ASN yang mendapatkan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan	Prov. Kep. Babel	100%	3.515.025.000	APBD		100%	3.750.000.000
				Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya		80%	62.741.237.923	APBD		80%	86.977.016.321
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya	Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas	Luar Prov. Kep. Babel	23 Raperda/produk hukum lainnya	12.902.550.000	APBD		25 Raperda/produk hukum lainnya	25.718.779.900
				Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	Prov. Kep. Babel	15 paripurna istimewa/biasa	346.900.000	APBD		3 paripurna istimewa, 12 paripurna biasa	771.645.919
				Reses	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	Prov. Kep. Babel	3 dokumen/laporan	7.135.287.923	APBD		3 dokumen/laporan	9.881.477.100
				Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat	Luar Prov. Kep. Babel	90 orang	1.500.000.000	APBD		90 orang	2.000.559.550
				Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se-Indonesia	Jumlah rekomendasi / kesepakatan	Luar Prov. Kep. Babel	3 kesepakatan	250.000.000	APBD		3 kesepakatan	708.424.750
				Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	Jumlah tenaga ahli dan pakar hukum	Prov. Kep. Babel	7 tenaga ahli dan 5 kelompok pakar/tim ahli	1.018.100.000	APBD		7 tenaga ahli dan 5 kelompok pakar/tim ahli	1.018.100.000
				Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum DPRD	Jumlah dokumen/laporan	Luar Prov. Kep. Babel	5 dokumen/laporan	150.000.000	APBD		5 laporan	266.200.000

				Kunjungan Kerja Komisi	Jumlah laporan Kunjungan Kegiatan Komisi	Luar Prov. Kep. Babel	384 laporan	35.391.538.500	APBD		480 laporan	37.265.577.580
				Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	Jumlah laporan Kunjungan Kegiatan Badan musyawarah	Luar Prov. Kep. Babel	6 laporan	1.090.062.500	APBD		6 dokumen /laporan	1.758.543.820
				Kunjungan Kerja Badan Anggaran	JJumlah laporan Kunjungan Kegiatan Badan Anggaran	Luar Prov. Kep. Babel	6 laporan	1.700.000.000	APBD		6 dokumen /laporan	3.315.986.850
				Kunjungan Kerja Badan Legislasi/BAPEMPERDA	Jumlah laporan Kunjungan Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan daerah	Luar Prov. Kep. Babel	6 laporan	800.000.000	APBD		6 dokumen /laporan	2.564.877.862
				Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	Jumlah laporan Kunjungan Kegiatan Badan Kehormatan	Luar Prov. Kep. Babel	6 laporan	299.999.000	APBD		6 dokumen /laporan	1.251.006.900
				Pembahasan Anggaran Pemprov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Dokumen/nota kesepakatan	Prov. Kep. Babel	4 dokumen/ laporan	156.800.000	APBD		4 dokumen/ laporan	503.118.000
				Fit and Proper Test tentang Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Terpilihnya anggota Komisi Lembaga Negara Lainnya	Prov. Kep. Babel	0 orang	0			0 orang	0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan acuan atas rencana aksi untuk melaksanakan atau mengoperasionalkan berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Program adalah suatu kumpulan kegiatan yang diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu rencana.

Kegiatan adalah penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian Visi dan Misi perangkat daerah.

Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Utama :

PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

Dengan Kegiatan :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Rapat-Rapat Paripurna
3. Kegiatan Reses
4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD
5. Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se-Indonesia.
6. Penyediaan Tenaga Ahli & Kegiatan Akademik
7. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum DPRD.
8. Kunjungan Kerja Komisi.
9. Kunjungan Kerja Badan Musyawarah.
10. Kunjungan Kerja Badan Anggaran.
11. Badan Legislasi/Badan Pembentukan Peraturan Daerah

12. Badan Kehormatan.
13. Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel.
14. Fit dan Proper Test Tentang Pemilihan Anggota Komisi Lembaga Negara Lainnya.
15. Forum Komunikasi Sekwan Se-Indonesia

2. Program Pendukung

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN

Dengan Kegiatan :

1. Publikasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPRD & Sekretariat
3. Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD

3. Program Rutin :

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH

Dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
5. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

TABEL 4
Rencana Kerja & Pendanaan
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	<i>Prosentase anggota DPRD dan Aparatur Perangkat Daerah yang puas terhadap pelayanan Kesekretariatan</i>		90%	6.329.600.000	APBD
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Anggota DPRD dan pegawai (ASN dan THL) Perangkat daerah yang terlayani (Orang)	Prov. Kep. Babel	265 orang	5.169.600.000	APBD
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Seragam Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Perangkat daerah (Stel)	Prov. Kep. Babel	562 stel	750.000.000	APBD
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	Luar Prov. Kep. Babel	80 orang	300.000.000	APBD
		Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah ()		77%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	Prov. Kep. Babel	3 Dokumen	55.000.000	APBD
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (laporan)	Prov. Kep. Babel	7 dokumen	55.000.000	APBD

				Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Kehumasan dan Protokol Dewan	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoleraan bagi anggota DPRD		95%	9.280.400.000	APBD
				Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah publikasi fungsi kelembagaan	Prov. Kep. Babel	200 Publikasi	2.000.000.000	APBD
				Forum Komunikasi Sekwan se-Indonesia	Jumlah rekomendasi/ kesepakatan Sekretaris DPRD se Indonesia dalam FORKOM	Prov. Kep. Babel	0%	0	APBD
					Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan		77%		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPRD dan Sekretariat	Jumlah peningkatan sarana prasarana Sekretariat DPRD	Prov. Kep. Babel	77%	4.100.000.000	APBD
				Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD	Persentase anggota DPRD & ASN yang mendapatkan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan	Prov. Kep. Babel	100%	3.180.400.000	APBD
				Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya		80%	75.855.487.923	APBD
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya	Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas	Luar Prov. Kep. Babel	23 Raperda/produk hukum lainnya	18.000.000.000	APBD
				Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	Prov. Kep. Babel	3 paripurna istimewa, 12 paripurna biasa	350.000.000	APBD
				Reses	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	Prov. Kep. Babel	3 dokumen/laporan	7.130.487.923	APBD
				Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat	Luar Prov. Kep. Babel	90 orang	1.500.000.000	APBD

				Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se-Indonesia	Jumlah rekomendasi / kesepakatan	Luar Prov. Kep. Babel	3 kesepakatan	250.000.000	APBD
				Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	Jumlah tenaga ahli dan pakar hukum	Prov. Kep. Babel	10 tenaga ahli dan pakar hukum	775.000.000	APBD
				Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum DPRD	Jumlah dokumen/ laporan	Luar Prov. Kep. Babel	5 laporan	150.000.000	APBD
				Kunjungan Kerja Komisi	Jumlah laporan Kunjungan Kegiatan Komisi	Luar Prov. Kep. Babel	384 laporan	43.000.000.000	APBD
				Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	Jumlah laporan Kunjungan Kegiatan Badan musyawarah	Luar Prov. Kep. Babel	6 dokumen /laporan	1.500.000.000	APBD
				Kunjungan Kerja Badan Anggaran	Jumlah laporan Kunjungan Kegiatan Badan Anggaran	Luar Prov. Kep. Babel	6 dokumen /laporan	1.500.000.000	APBD
				Kunjungan Kerja Badan Legislasi/BAPEMPERDA	Jumlah laporan Kunjungan Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan daerah	Luar Prov. Kep. Babel	6 dokumen /laporan	950.000.000	APBD
				Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	Jumlah laporan Kunjungan Kegiatan Badan Kehormatan	Luar Prov. Kep. Babel	6 dokumen /laporan	550.000.000	APBD
				Pembahasan Anggaran Pemprov. Kep. Bangka Belitung	JumlahDokumen nota/kesepakatan	Prov. Kep. Babel	4 dokumen/ laporan	200.000.000	APBD
				Fit and Proper Test tentang Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Terpilihnya anggota Komisi Lembaga Negara Lainnya	Prov. Kep. Babel	0 orang	0	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 merupakan dokumen strategis yang disusun berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Disadari bahwa dalam perjalanannya nanti tidak terlepas dari kelemahan, kekurangan, hambatan dan kendala yang akan dihadapi dan kiranya dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana dan mendapat dukungan semua pihak.

Keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap menjalankan hak dan kewajiban konstitusinya adalah keberhasilan Dewan sendiri. Sementara dalam proses pelaksanaan hak tersebut ada kekurangan merupakan kekurangan kami di Sekretariat Dewan sebagai unsur pelayan administrasi kepada Dewan. Sekretariat Dewan hanya berusaha untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga terlaksana.

SEKRETARIS DPRD



SYAIFUDDIN, SH
NIP. 19630312 198503 1 013